

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidak seimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif yang artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan semula.

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salah satu peran perencanaan adalah sebagai arah bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan sedang pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses menuju ke arah yang lebih baik dan terus menerus untuk mencapai tujuan yakni mewujudkan masyarakat indonesia yang berkeadilan berdaya saing maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan upaya pembangunan harus meliputi segala aspek bidang kehidupan, karena pembangunan bersifat multidimensianal, tidak hanya mencakup kegiatan perekonomian, namun juga mencakup kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Maka pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan.

Proses pembangunan di Indonesia dan serangkaian kebijakan pemerintah dibidang ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini merupakan pertanda berhasilnya pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan. Pembangunan ekonomi yang telah dilakukan tidak hanya

bertujuan untuk menciptakan modernisasi dalam suatu masyarakat, tetapi yang lebih penting adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat tersebut. Disamping keberhasilan pertumbuhan ekonomi tersebut masih banyak masalah yang berkaitan dengan pemerataan, terutama dalam hal pemerataan berbagai pendapatan. Persoalan pertama adalah masih cukup banyak penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan persoalan kedua adalah masih banyak ketimpangan pendapatan.

Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun masih jauh dari induk permasalahan kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas.

Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumberdaya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi, karena dengan penghasilan yang rendah tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan dan nutrisi secara baik sehingga menyebabkan kualitas sumberdaya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah yang akhirnya berakibat pada rendahnya produktivitas. Selain itu,

rendahnya kualitas sumberdaya manusia menyebabkan kelompok ini tersisih dari persaingan ekonomi, politik, sosial budaya maupun psikologi sehingga semakin tidak mampu mendapatkan kesempatan yang baik dalam sistem ekonomi masyarakat.

Kemiskinan ini memang selalu berada di perdesaan karena tingkat taraf hidup masyarakat desa yang masih rendah, sedangkan yang berada di perkotaan adalah setiap orang yang tidak memiliki keahlian untuk dapat menghasilkan pendapatan yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, karena kemiskinan adalah ketidak mampuan untuk memenuhi standart minimum (Kuncoro, 2003: 123)

Permasalahan strategis di Pulau Madura tidak jauh berbeda dengan di pemerintah Provinsi Jawa Timur atau pemerintah pusat (problem nasional), yakni masih tingginya angka kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Dari hasil penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur masih relatif tinggi dari enam Provinsi di Pulau Jawa. Hasil rata-rata tingkat kemiskinan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 yang menunjukkan tingkat kemiskinan di enam Provinsi di pulau Jawa.

Tabel 1.1
Persentase Kemiskinan Enam Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2004-2008

No	Provinsi	2005	2006	2007	2008	Rata-Rata
1	DKI Jakarta	3,61	4,57	4,61	4,29	4,27
2	Banten	8,86	9,79	9,07	8,15	8,96
3	Jawa Barat	13,06	14,49	13,55	13,01	13,52
4	Jawa Timur	19,95	21,09	19,98	18,51	19,88
5	DIY	18,95	19,15	18,99	18,32	18,85
6	Jawa Tengah	20,49	22,19	20,43	18,99	20,52

Sumber: BPS Jawa Timur, Data dan Informasi Kemiskinan Jatim

Tabel 1.1. terlihat menunjukkan tingkat kemiskinan di enam Provinsi di pulau Jawa. Rata-rata tingkat kemiskinan Jawa Timur masih relatif tinggi nomor dua dari enam provinsi di pulau Jawa, yaitu sebesar 19,88 persen. peringkat pertama ditempati oleh Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 20,52 persen, peringkat ketiga ditempati oleh Provinsi DIY dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 18,85 persen, peringkat keempat ditempati oleh Provinsi ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 13,52 persen. Provinsi Banten dengan rata-rata tingkat kemiskinan 8,96 persen menempati posisi kelima dan terakhir ditempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 4,27 persen. Adapun jumlah pertumbuhan penduduk miskin pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah dan Persentase Terhadap Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2009-2010

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk Miskin		Persentase Terhadap Jumlah Penduduk Miskin	
		2009	2010	2009	2010
1	Pacitan	102,93	105,4	19,01	19,50
2	Ponorogo	127,51	113,0	14,63	13,22
3	Trenggalek	119,59	107,8	18,27	15,98
4	Tulungagung	101,95	105,4	10,60	10,64
5	Blitar	136,76	135,5	13,19	12,14
6	Kediri	239,89	232,8	17,05	15,52
7	Malang	318,95	306,7	13,57	12,54
8	Lumajang	157,76	140,8	15,83	13,98
9	Jember	348,07	311,7	15,43	13,27
10	Banyuwangi	180,98	175,1	12,16	11,25
11	Bondowoso	138,65	131,9	20,18	17,89
12	Situbondo	96,82	105,2	15,99	16,23
13	Probolinggo	280,10	276,6	27,69	25,22
14	Pasuruan	219,37	199,3	15,58	13,18
15	Sidoarjo	120,86	145,4	6,91	7,45
16	Mojokerto	130,13	25,4	13,24	12,23
17	Jombang	182,49	166,4	14,46	13,84
18	Nganjuk	167,30	151,6	17,22	14,91
19	Maduun	105,65	102,3	16,97	15,45
20	Magetan	84,74	80,2	13,97	12,95
21	Ngawi	154,13	149,1	19,01	18,26
22	Bojonegoro	262,04	227,2	21,27	18,78
23	Tuban	240,98	225,8	23,01	20,19
24	Lamongan	235,93	220,5	20,47	18,70
25	Gresik	225,77	193,8	19,14	16,42
26	Bangkalan	287,65	255,6	30,45	28,12
27	Sampang	285,02	285,4	31,94	32,47
28	Pamekasan	200,98	179,2	24,32	22,48
29	Sumenep	264,98	256,6	26,89	24,61
30	K.Kediri	27,52	24,9	10,41	9,31
31	K.Blitar	9,78	10,1	7,56	7,63
32	K.Malang	44,37	48,4	5,58	5,90
33	K.Probolinggo	47,08	41,4	21,06	19,03
34	K.Pasuruan	15,76	16,8	9,34	9,00
35	K.Mojokerto	7,89	8,9	7,19	7,42
36	K.Madiun	10,32	10,4	5,93	6,11
37	K.Surabayaq	171,21	195,6	6,27	7,07
38	K.Batu	8,84	9,7	4,81	5,11

Sumber: BPS Jawa Timur dalam angka 2009-2010

Dari tabel 1.2 dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin pada beberapa kabupaten di provinsi jawa timur mengalami fluktuasi setiap tahunnya atau menunjukkan jumlah penduduk miskin tiap tahunnya berubah-ubah. Di madura sendiri terdapat beberapa kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang,

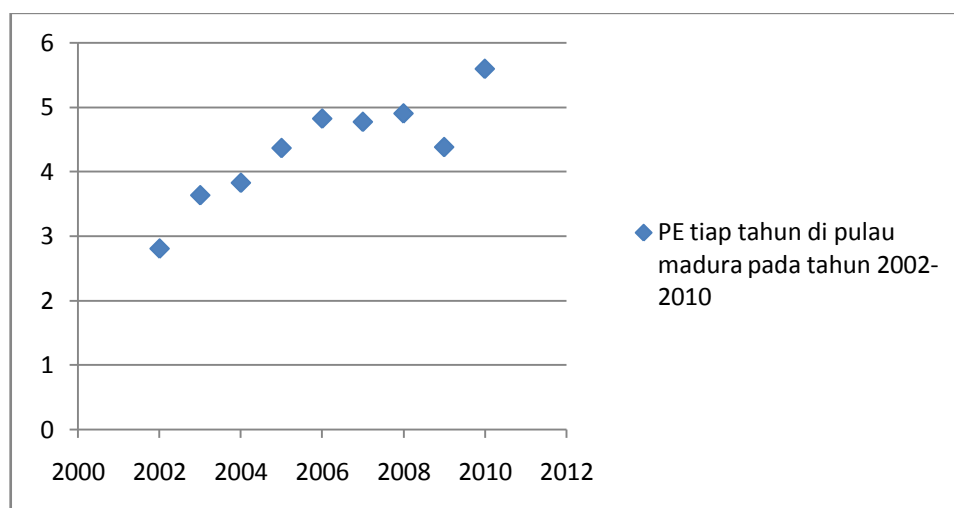
Pamekasan dan Sumenep. Dari empat kabupaten tersebut merupakan wilayah yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbesar dari 29 kabupaten di Jawa Timur. Wilayah yang merupakan jumlah tingkat kemiskinannya terbesar di Pulau Madura adalah Kabupaten Sampang. Jumlah persentase pertumbuhan penduduk miskin pada tahun 2009-2010 di Pulau Madura adalah: Kabupaten Bangkalan pada tahun 2009 sebanyak 30,45 (persen) , tahun 2010; 28,12 persen. Menunjukkan Kabupaten Bangkalan mengalami penurunan pada tingkat kemiskinan. Kabupaten Sampang pada tahun 2009: 31,94 persen dan pada tahun 2010: 32,47 persen merupakan tiap tahunnya mengalami peningkatan pada tingkat kemiskinan. Kabupaten Pamekasan pada tahun 2009: 24,32 persen, tahun 2010: 22,48 persen. Yang menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan mengalami penurunan pada tingkat kemiskinannya. Kabupaten Sumenep pada tahun 2009; 26,89 persen, tahun 2010; 24,61 persen mengalami penurunan pada tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep.

Menurut Badan Pusat Statistik 2010, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan dibawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan dibawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih, dan fasilitas tempat pembuangan air besar); pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun, dan angka putus sekolah); dan kesehatan

(rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

Laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura pada tahun 2002-2010 dapat dilihat pada Gambar 1.1. Bahwa pertumbuhan ekonomi di Madura pada tahun 2002-2010 tidak stabil. Pada tahun 2002 sampai tahun 2006, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2002 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,81 dan 2003 sebesar 3,635. Tahun 2004 sebesar 3.8275 dan tahun 2006 sebesar 4,82. Dari tahun 2006 ke 2007 mengalami penurunan dan akan mengalami peningkatan pada tahun 2008 sebesar 4,9. Pada tahun 2009 mengalami gejolak penurunan pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi tahun 2010 terjadi kenaikan secara dratis sebesar 5,59. Maka laju pertumbuhan ekonomi di pulau Madura tidak stabil, tidak hanya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Gambar 1.1
Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi
Di Pulau Madura Pada Tahun 2002-2010

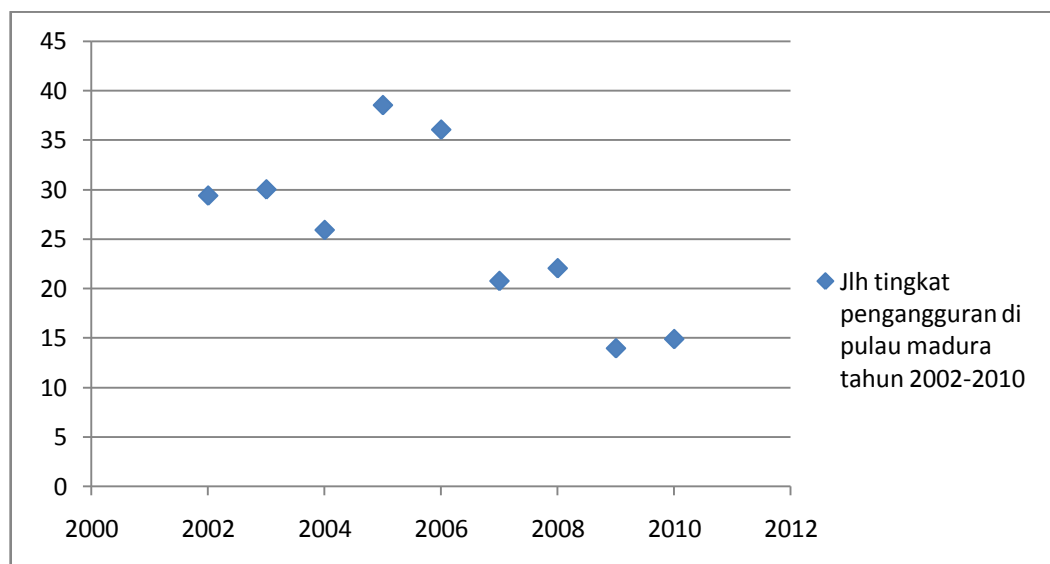


Sumber: BPS Jawa Timur (di Olah)

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat pula mempengaruhi tingkat pengangguran. Jika masalah kesempatan kerja dilihat sebagai masalah

pengangguran seperti di Negara-negara industri, maka pemecahannya adalah dengan pemberian iklim yang baik bagi pengembangan usaha yang pada gilirannya akan mampu menciptakan lapangan kerja, atau penyerap tenaga kerja. Maka suatu perekonomian harus tumbuh untuk mengatasi pengangguran. Jumlah pengangguran di Madura sendiri dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1.2
Rata-Rata Tingkat Pengangguran di Pulau Madura
Tahun 2002-2010

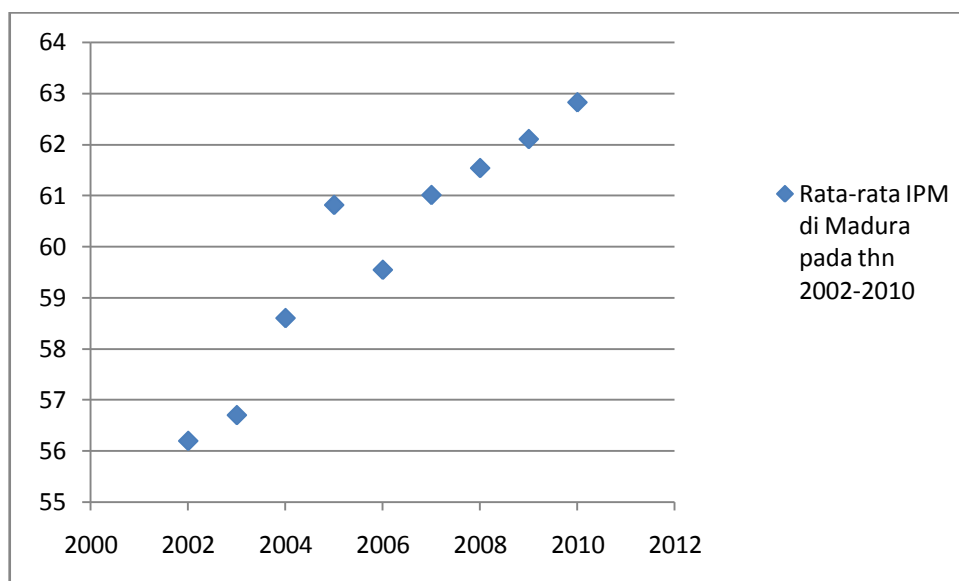


Sumber: BPS Jawa Timur

Gambar 1.2 menunjukkan rata-rata tingkat pengangguran di Madura tidak stabil pada tahun ke tahun mengalami fase naik turun. Pada tahun 2002, tingkat pengangguran sebesar 29,396 persen, kemudian naik menjadi 30,023 persen pada tahun 2003. Pada tahun 2004 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2004 ke 2005 mengalami kenaikan yaitu sebesar: tahun 2004 (25.929 persen), 2005 (38,52 persen), 2006 (36,05 persen). pada tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami gejolak yang lumayan dratis yaitu sebesar 13,99 persen dari tahun 2008 sebesar 22,07 persen. Tahun 2010 rata-rata tingkat pengangguran di pulau madura sebesar 14,92 persen.

Kualitas sumberdaya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/indeks pembangunan manusia. Rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumberdaya manusia pada empat kabupaten di madurayang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Gambar 1.3
Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia
di Pulau Madura Tahun 2002-2010



Sumber: BPS Jawa Timur

Gambar 1.3 menunjukkan rata-rata indeks pembangunan manusia di pulau madura dari tahun ketahun menunjukkan ketidaksetabilan. Hal itu terbukti pada tahun 2002-2010. Tahun 2002 sampai tahun 2005, 2002 sebesar 56,19 persen, 2003 sebesar 56,70 persen dan tahun 2005 sebesar 60,81 persen. tahun 2006 mengalami penurunan pada IPM di madura sebesar 59,54 persen, dan seterusnya mngalami fase naik turun tiap tahunnya.

Dari berbagai data diatas, dapat diketahui bahwa dari tahun ketahun ketidak stabilan jumlah pertumbuhan penduduk miskin, pertumbuhan Ekonomi, pengangguran dan jumlah Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu perlu kiranya diteliti mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengangguran serta IPM terhadap kemiskinan di pulau Madura. Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai seberapa besar pengaruh dari masing-masing fariabel terhadap kemiskinan dan bagaimana keadaan kemiskinan di wilayah madura di empat kabupaten pada tahun 2002-2010.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di pulau Madura di empat kabupaten pada tahun 2002-2010?
2. Apakah variabel tingkat pengangguran mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di pulau Madura di empat kabupaten pada tahun 2002-2010?
3. Apakah variabel Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan di pulau madura di empat kabupaten pada tahun 2002-2010?
4. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran, serta IPM secara simultan mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di pulau madura pada tahun 2002-2010

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi kemiskinan di pulau madura di empat kabupaten pada tahun 2002-2010.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel tingkat pengangguran yang dapat mempengaruhi kemiskinan di pulau madura di empat kabupaten pada tahun 2002-2010.
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel indeks pembangunan manusia yang dapat mempengaruhi kemiskinan di pulau madura di empat kabupaten pada tahun 2002-2010.
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi, pengangguran serta IPM yang secara simultan dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di pulau madura di empat kabupaten pada tahun 2002-2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat diantaranya;

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat memberikan informasi dan pengetahuan berkaitan dengan masalah perencanaan pembangunan, dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang akan menyusun dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, dan juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan.

2. Bagi Dunia Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya, dan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi terbagi menjadi 5 bab yang saling berkaitan dan disesuaikan dengan materi pembahasan. Secara garis besar kerangka pembahasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori – teori yang melandasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada. Landasn teori ini diperoleh selama masa perkuliahan maupun literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai dasar pedoman penelitian. Bagian selanjutnya mengenai tinjauan pustaka terhadap penelitian sebelumnya yang menjelaskan letak persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bagian akhir dari bab ini adalah hipotesis atau model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab 3 ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Adapun bagian-bagian dari metode penelitian tersebut terdiri dari

pendekatan penelitian, Identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi inti dari penulisan skripsi dimana menganalisis hasil penelitian yang dilakukan dari data yang diperoleh maupun dari hasil pengolahan data yang dilakukan penulis. Adapun bagian-bagian dari bab ini antara lain, gambaran umum dari obyek penelitian, hasil pengujian, pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Dimana dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dari pembahasan serta sarana yang dianggap perlu yang berkenaan dengan pembahasan skripsi.